

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

Jl. Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H, No.1, Bukit Pelangi Sangatta

Kutai Timur - Kalimantan Timur 75683

Telp. 0549-25767 Fax. 0549-25767

e-mail : pa-sangatta@pta-samarinda.net



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H, No.1, Bukit Pelangi Sangatta

Telp. 0549-25767 Fax. 0549-25767

Kutai Timur - Kalimantan Timur 75683

e-mail : pa-sangatta@pta-samarinda.net

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sangatta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 30 Juni 2026

Ketua,


Ismail, S.H.I, M.H.

NIP. 198312102009041008

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	22
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	60

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sangatta

**Jl. Prof. Dr. Baharudin Lopa, S.H, No.1, Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur -
Kalimantan Timur 75683**

Telp. 0549-25767 Fax. 0549-25767 e-mail : pa-sangatta@pta-samarinda.net

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 30 Juni 2026

Kasa Pengguna Anggaran,



Yuri Adi Dharma, S.Kom.

NIP.198501172006041001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2026 .

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.4.106.250,- atau mencapai 87 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.4.703.000,-

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 6.959.136.194,- atau mencapai 59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.794.996.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.163.537.706,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 4.139.695.206,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 671.811.922,- dan Rp. 3.491.725.784,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.4.106.250,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 6.583.675.499,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(6.579.569.249,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit

Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(6.579.569.249,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 3.116.265.089,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(6.579.569.249,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.6.955.029.944,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 3.491.725.784,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SANGATTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2026		% thd Angg	TA 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	Rp 4.703.000,00	Rp 4.106.250,00	87,00	Rp 4.702.300,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 95.603.000,00	Rp 4.106.250.000,00	87,00	Rp 4.702.300,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	10.285.450.000	6.083.256.471	59,00	2.939.618.819
Belanja Barang	B.4	Rp 1.437.546.000,00	Rp 803.879.728,00	56,00	Rp 1.014.601.274,00
Belanja Modal	B.5	72.000.000	71.999.995	100,00	575.244.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		Rp 11.794.996.000,00	Rp 6.959.136.194,00	59,00	Rp 4.835.859.806,00

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

NERACA

PER 30 juni 2026 dan 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2026	2025
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Persediaan	4.160.000	-
JUMLAH ASET LANCAR	4.160.000	-
JUMLAH ASET		
Tanah	1.339.500.000	1.339.500.000
Peralatan dan Mesin	3.094.950.402	2.776.973.407
Gedung dan Bangunan	2.913.652.000	2.913.652.000
Aset Tetap Lainnya	3.427.109	3.427.109
Akumulasi Penyusutan	(3.211.834.305)	(2.821.292.246)
JUMLAH ASET TETAP	4.139.695.206	4.212.260.270
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-Lain	27.000.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(32.400.000)	(4.900.000)
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	4.163.537.706	4.319.722.676
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	635.924.947	-
Utang yang belum ditagihkan	15.886.975	-
Uang muka dari KPPN	20.000.000	30.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	671.811.922	30.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN	671.811.922	30.000.000
EKUITAS		
EKUITAS	3.491.725.784	4.212.250.270
JUMLAH EKUITAS	3.491.725.784	4.212.260.270
JUMLAH EKUITAS	3.491.725.784	4.212.260.270
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.163.537.706	4.212.260.270

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SANGATTA LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2026 DAN 2025

LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0
Pendapatan pajak penghasilan	0	0
Pendapatan pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah	0	0
pendapata pajak bumi dan bangunan	0	0
Pendaptan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	0	0
pendapat cukai	0	0
pendapatan bea masuk	0	0
pendapatan bea keluar	0	0
jumlah pendapatan perpajakan	0	0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0
pendapatan sumber daya alam	0	0
pendapatan dari kekayaan alam yang di pisahkan (KND)	0	0
Pendapatan penerimaan negara bukan pajak	4.106.250	4.702.300
pendapatan dari kekayaan negara bukan pajak lainnya	0	0
pendapatan layanan umum	0	0
jumlah pendapatan negara bukan pajak	4.106.250	4.702.300
PENDAPATAN HIBAH	0	0
pendapatan hibah	0	0
jumlah pendapatan hibah	0	0
jumlah pendapatan	4.106.250	4.702.300
BEBAN OPERASIONAL	0	0
beban pegawai	5.609.150.298	1.447.488.980
beban persediaan	2.345.500	9.926.500
beban barang dan jasa	524.102.531	315.731.639
beban pemeliharaan	226.886.488	138.575.927
beban perjalanan dinas	76.625.623	36.909.782
beban barang untuk di serahkan kepada masyarakat/pemda	0	0
Beban pembayaran bunga utang	0	0
beban subsidi	0	0
beban hibah	0	0
beban sosial	0	0
Beban penyusutan dan amortisasi	144.565.059	111.275.631
Beban penyisihan piutang tak tertagih	0	0
Beban transfer ke daerah	0	0

Beban lain-lain	0	0
JUMLAH BEBAN	6.583.675.499	2.059.908.504
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6.579.569.249)	(2.055.206.204)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0
surplus/defisit pelepasan aset	0	0
surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0
surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0
Beban penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0
surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0	0
pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6.579.569.249)	(2.055.206.204)
BEBAS LUAR BIASA	0	0
POS LUAR BIASA	0	0
SURPLUS/DEFISIT -Llo	(6.579.569.249)	(2.055.206.204)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SANGATTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN
EKUITAS AWAL	3.116.265.089	3.810.530.093	(694.265.004)
SURPLUS/DEFESIT-LO	(6.579.569.249)	(2.055.206.204)	(4.524.363.045)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI KUITAS PENYESUAIAN NILAI ASET	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	-	-	-
LAIN LAIN	-	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	6.955.029.944	1.793.212.816	5.161.817.128
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	375.460.695	(261.993.388)	637.454.083
EKUITAS AKHIR	3.491.725.784	3.548.536.705	(56.810.921)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sangatta

Dasar Hukum Pengadilan Agama Sangatta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Prof.Dr.Baharuddin Lopa,SH Sangatta.

Entitas dan

Rencana

Strategis

Pengadilan Agama Sangatta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Sangatta berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TA 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui **MyIntress (My Integrated Treasury System)** adalah sistem monitoring pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sistem ini berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk memantau seluruh proses pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pembayaran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dalam satu portal terpadu. MyIntress mulai diimplementasikan secara luas pada Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara.

Secara umum, **MyIntress (My Integrated Treasury System)** terdiri atas beberapa kelompok laporan yang mengintegrasikan data dari SAKTI, SPAN, dan sistem perbendaharaan lainnya.

MyIntress (My Integrated Treasury System) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Sangatta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mempengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Sangatta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sangatta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka

Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Sangatta* sudah melakukan revisi DIPA.

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		-
Pendapatan Jasa	4.703.000	4.703.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	4.703.000	4.703.000
Belanja		-
Belanja Pegawai	10.285.450.000	10.285.450.000
Belanja Barang	1.437.546.000	1.437.546.000
Belanja Modal	72.000.000	72.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	11.794.996.000	11.794.996.000

Realisasi

*Pendapatan Rp.
4.106.250,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.4.106.250,- atau mencapai 87 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0 Pendapatan yang diterima Pengadilan Agama Sangatta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNBP	4.703.000	4.106.250	87,00
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	4.703.000	4.106.250	100,00

Realisasi Pendapatan PNBP per 30 Juni 2026 dan TA 2026 mengalami penurunan sebesar sebesar (12.68%).

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2026 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A. 2026	REALISASI T.A. 2025	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	4.106.250	4.702.300	-12,68
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	4.106.250	4.702.300	-12,68

Realisasi Belanja

Negara Rp.

6.959.136.194,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.6.959.136.194,- atau 59 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 11.794.996.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026

Uraian	2026	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		-
Pendapatan Jasa	4.703.000	4.703.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	4.703.000	4.703.000
Belanja		-
Belanja Pegawai	10.285.450.000	10.285.450.000
Belanja Barang	1.437.546.000	1.437.546.000
Belanja Modal	72.000.000	72.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	11.794.996.000	11.794.996.000

Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi Belanja TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 169.22 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya kenaikan Gaji Hakim, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2026 dan 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.083.256.471	1.264.623.009	381,03
Belanja Barang	803.879.728	501.817.107	60,19
Belanja Modal	71.999.995	11.475.000	527,45
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	6.959.136.194	1.777.915.116	291,42

Belanja Pegawai**B.3 Belanja Pegawai****Rp.****10.285.450.000,-**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.6.083.256.471,- dan Rp. 2.380.779.000,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar 155,51 persen dari TA 2025. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan gaji hakim, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan adanya perubahan status CPNS menjadi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.083.256.471	1.284.623.009	373,54
Jumlah Belanja Kotor	6.083.256.471	1.284.623.009	373,54
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0
Jumlah Belanja	6.083.256.471	1.284.623.009	373,54

Belanja Barang**B.4 Belanja Barang****Rp.1.437.546.000,-**

Realisasi Belanja Barang per TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.803.879.726,- dan Rp.501.817.107,- Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 32,05 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal ini disebabkan karena Belanja modal tahun 2026 lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan tahun 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2026 dan 2025

URAIAN	30 Juni 2025	30 JUNI 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	443.862.756	163.139.607	172,08
Belanja Barang Non Operasional	2.345.500	20.000.000	(88,27)
Belanja Barang Persediaan	5.742.500	13.888.500	(58,65)
Belanja Jasa	54.159.359	54.000.000	0,30
Belanja Pemeliharaan	221.143.988	200.154.000	10,49

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	76.625.623	50.635.000	51,33
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	803.879.726	501.817.107	60,19
Pengembalian Belanja	-	-	0
Jumlah Belanja	803.879.726	501.817.107	60,19

Belanja Modal

Rp.72.000.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.71.999.995,- dan Rp. 11.475.000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2026 terdapat anggaran belanja modal Pengadaan Kusi dan Meja Hakim dan CPNS Pengadilan Agama Sangatta.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2026 sebesar Rp.71.999.995,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 Juni 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.999.995	11.475.000	527,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	71.999.995	11.475.000	15,94
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	71.999.995	11.475.000	527,45

Belanja Modal

Tanah Rp. 0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025

URAIAN JENIS BELANJA	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp. 0,-*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0. tidak ada realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2026 dan tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.
0,-*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan,Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rp. 0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025

URAIAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0		0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Lainnya Rp.0,- Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Belanja **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial Rp.0,- Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.20.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Rekening Bank	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp.0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2026 dan 2025

Keterangan	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB Rp.0

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Nama	TAHUN 2026	TAHUN 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Bagian Lancar

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA

Rp.0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 30 Juni 2026 dan 2025

No	Nama	TAHUN 2026	TAHUN 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih –

Piutang Lancar

Rp .0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidakterttagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 2025*

Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan		0,00%	0
Macet		0,00%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Belanja Dibayar di Muka Rp.0 **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2026 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka Per 30 Juni 2026 dan 2025

Jenis	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Pembayaran Domain dan Hosting	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah		0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar R p.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2026 dan 2025

Jenis	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp.0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.2.345.500,- dan Rp. 9.926.500,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

Jenis	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Barang Konsumsi	2.345.500	9.926.500
Barang untuk Pemeliharaan	-	0
Bahan Baku	-	0
Jumlah	2.345.500	9.926.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Debitur	TAHUN 2026	TAHUN 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp.0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Per 30 Juni 2026 dan 2025

No	Debitur	TAHUN 2026	TAHUN 2025
1	NIHIL	0	0
2		0	0
3		0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Jangka Panjang

Rp.0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Per 30 Juni 2026

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
Jumlah	0		0
Tagihan PA			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan		0,00%	0
Macet		0,00%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0	0

Tanah

Rp.1.339.500.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Sangatta per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.1.339.500.000 dan Rp.1.339.500.000.

Saldo Nilai Perolehan Per 30 JUNI 2026	1.339.500.000
Mutasi tambah:	0
Hibah Masuk	0
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	0

Akumulasi Penyusutan	0
Saldo pe 30 Juni 2026	1.339.500.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah periode 30 Juni 2026

1	4.465	M2	Sangatta	1,339,500,000
Jumlah				1,339,500,000

Terdapat Hibah Tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 032/00028/BPKAD.08/V/2017, tanggal 16 April 2017 dengan nilai Rp. 1.339.500.000,-.

*Peralatan dan
Mesin*

*Rp.
3.094.950.402,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.3.094.950.402,- dan Rp.2.776.973.407,-. terdapat mutasi tambah sejumlah Rp. 317.976.995 pada nilai Peralatan dan Mesin pada periode s.d. 30 Juni 2026.

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	3.094.950.402	
Pembelian	-	-
Hibah Barang		
Transfer Masuk		
Koreksi Tambah		
Mutasi Kurang :		
Penghentian dari Penggunaan		
Saldo per 30 Juni 2026		3.094.950.402
Nilai Buku per 30 Juni 2026		3.094.950.402

*Gedung dan
Bangunan*

Rp.2.913.652.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.2.913.652.000,- dan Rp.2.913.672.000,-. Tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi pada nilai Gedung dan Bangunan pada periode s.d. 30 Juni 2026.

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	2.913.652.000	
Mutasi Tambah : Pembangunan Tambahan Ruang Kelas	-	-
Mutasi Kurang : Penghentian dari Penggunaan		
Saldo per 30 Juni 2026	2.913.652.000	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	2.913.652.000	

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 an 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada periode pelaporan:

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	-	
Mutasi Tambah : Penambahan Jaringan Teknologi Informasi	-	-
Mutasi Kurang : Penghentian dari Penggunaan		
Saldo per 30 Juni 2026	-	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-	

*Aset Tetap Lainnya
Rp.3.427.109,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.3.427.109,- dan Rp.3.427.109,-. Tidak terdapat mutasi tambah pada aset tetap lainnya untuk tahun 2026, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	3.427.109	
Mutasi Tambah :	-	-
-		
Mutasi Kurang :		
-		
Saldo per 30 Juni 2026	3.427.109	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	3.427.109	

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(3.211.834.305,
-)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing (Rp.3.211.834.305,-) dan (Rp.2.821.292.246,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2026

N O	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	2.288.181.507	488.791.900	2.776.973.407
2	Gedung dan Bangunan	2.726.062.000	187.590.000	2.913.652.000
3	Jalan,Irigasi & Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya	3.427.109	-	3.427.109
	AKUMULASI PENYUSUTAN	5.017.670.616	676.381.900	5.694.052.516

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud

Rp.4.900.000,-

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp.4.900.000,- dan Rp.4.900.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	4.900.000	
Mutasi Tambah : Pembelian	-	-
Mutasi Kurang : -		
Saldo per 30 Juni 2026	4.900.000	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	-	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	4.900.000	

Aset tak berwujud berupa pembelian Software jenis Kaspersky Endpoint Security for Business-Select, type public sector.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2026

Uraian	Nilai Perolehan
SOFTWARE	4,900,000
Penyusutan	(4,900,000)
Jumlah	0

Aset Lain-Lain

Rp.27.500.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 an 2024 adalah Rp.27.500.000 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut

SALDO NILAI PEROLEHAN PER 1 JANUARI 2026	-	
Mutasi Tambah :	-	-
Reklasifikasi dar Aset Tetap Mutasi Kurang : Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan Penghapusan BMN		
Saldo per 30 Juni 2026	-	
Akumulasi Penyusutan s.d30 Juni 2026	-	
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-	

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.32.400.000,-)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing (Rp.32.500.000,-) dan (Rp.4.900.000,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	4,900,000	(4,900,000)	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.635.924.947,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.635.924.947,- dan Rp.1.095.995.181,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.:

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp.0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per per 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	TAHUN 2026	TAHUN 2025
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	-	-

Belanja Barang yang masih harus dibayar		
Belanja Modal yang masih harus dibayar		
JUMLAH	-	-

Ekuitas

Rp.3.491.725.784,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 2054 adalah masing-masing sebesar Rp.3.491.725.784,- dan Rp.3.116.265.069,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp.4.106.250,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 4.106.250,- dan Rp.4.702.300,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2026 dan 2025*

URAIAN	TAHUN 2026	TAHUN 2025	NAIK/TURUN (%)
Persekot Gaji	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	4.106.250	4.702.300	14.51
JUMLAH	-	-	-

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.

5.609.150.298,-

Jumlah Beban Pegawai pada Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.609.150.298,- dan Rp.1.447.488.980,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan

Rp.2.345.500,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.345.500,- dan Rp.9.926.500,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik

yang dipasarkkan maupun tidak dipasarkkan. Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

URAIAN	TAHUN 2026	TAHUN 2025	NAIK/TURUN (%)
Beban Persediaan Konsumsi	2.345.500	9.926.500	(30,891)
Bebanpersediaan untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
JUMLAH	2.345.500	9.926.500	(30,891)

*Beban Barang dan
Jasa Rp.
524.102.631,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.524.102.631,- dan Rp.315.73.639,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan anggaran belanja untuk belanja operasional perkantoran.

*Beban
Pemeliharaan Rp.
226.886.488,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.226.886.488,- dan Rp.138.575.927,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas Rp.
76.625.623,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.76.625.623,- dan Rp.36.909.782,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. beban perjalanan dinas mengalami kenaikan disebabkan karena tidak adanya efisiensi

anggaran tahun 2026 sehingga pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan lain-lain dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Pengadilan Agama Sangatta periode sampai dengan 30 Juni 2026

.

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada Pengadilan Agama Sangatta periode sampai dengan 30 Juni 2026.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp.
144.565.059,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.144.565.059,- dan Rp.111.275.631,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

4Beban Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp.0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.3.116.265.089,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.3.116.265.089,- dan Rp.3.810.530.093,-.

Defisit LO

(Rp. 6.579.569.249,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar (Rp.6.579.569.249) dan (Rp.2.055.206.204,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp.0,-

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset pada Pengadilan Agama Sangatta periode sampai dengan 30 Juni 2026.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp.0,-

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/kurang atas

nilai persediaan untuk periode 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Sangatta periode sampai dengan 30 Juni 2026.

Selisih Revaluasi

E.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Rp.0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap

E.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi Rp.0,-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain

E.7 Koreksi Lain-Lain

Rp.0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, dan Koreksi lain-lain.

Transaksi Antar

E.8 Transaksi Antar Entitas

Entitas Rp.

Rp6.955.029.944,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.955.029.944,- dan Rp.1.793.212.816,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.9 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026 DDEL Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar (Rp.0,-)

E.10 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode hingga 30 Juni 2026 dan 2025, Tansfer masuk sebesar Rp. 0- dan Rp.0,- sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp.0,-.

E.11 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2026.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 adalah Rp0,-.

Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2026

*Ekuitas Akhir Rp.
3.491.725.784,-*

E.12 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.3.491.725.784,- dan Rp.3.548.536.705,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2026.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK Pengadilan Agama Sangatta per 30 Juni 2026 .

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat belanja secara akrual Pengadilan Agama Sangatta per periode 30 Juni 2026.

F.2.3 Ralat SPM,SSBP dan SSPB

Tidak terdapat Ralat SPM, SSBP maupun SSPB Pengadilan Agama Sangatta per 30 Juni 2026 .

F.2.4 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sangatta adalah:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sangatta A/C 0563-01-000145-30-1 a.n. BPg 046 PA Sangatta yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,-.
2. BRI Cabang Sangatta A/C 0563-01-000430-30-8 a.n. BPg 046 PA Sangatta 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,-.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Sangatta A/C 0563-01-000725-30-5 a.n. RPL 046 PA Sangatta UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0,- dan telah ditutup.
4. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sangatta A/C 7293841677 a.n. RPL 046 PDT PA SGTA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.62.614.000,-

F.2.5 Revisi DIPA/POK

Terdapat 6 kali Revisi DIPA Pada Satker 652097 s.d. periode per 30 Juni 2026.

F.2.6 Catatan Penting lainnya

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Sangatta Nomor : 3/SEK.W17-A7/KU1.1/1/2026, Tanggal 2 Januari 2026, tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama Pejabat Pengelola sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yuri Adi Dharma, S.Kom
Penguji SPP/Penandatanganan SPM	: Nurwasilah, S.H.
Bendahara Pengeluaran	: Sica Nodika Rihadatul Aisy,A.Md
Bendahara Penerima	: Muhammad Diki Efendi, A.Md.
Staf pengelola / PPABP	: Septia Clara Andini S.T.
Staf Pengelola/Administrator SAKTI	: Salsabila Khanza AC ,A.Md

